



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. 3, Jalan Rambutan
Telp./Fax (0552) 2028233 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : ~~005~~/DKP-I

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 05);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 903/33/3-BPKAD/2021, Tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Januari 2020

Kepala Dinas,



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19691103 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang berlaku;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. Menyiapkan SPM;
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. Melaksanakan fungsi akutansi pada SKPD; dan
 5. Menyusun Laporan Keuangan SKPD.
- KEEMPAT** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 3.25.01.1.02.02.5.1.01.03.07 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 3.25.01.1.02.02.5.1.01.03.07;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Kepala Dinas,



Ir. H. SYAHRULLAH MURSALIN, M.P
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19691103 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : **005** /DKP-I
TANGGAL : 05 JANUARI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. Hamlis, SE, M.AP NIP.197702041998031004	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan					
2	Fitriyani, S.Pi NIP. 198307132010012019	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3.25.01.1.01.01) 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (3.25.01.1.02.02) 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (3.25.01.1.05.02) 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (3.25.01.1.05.09) 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (3.25.01.1.05.10) 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.25.01.1.06.01) 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.25.01.1.06.02) 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.25.01.1.06.05) 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (3.25.01.1.06.06) 5 Fasilitas Kunjungan Tamu (3.25.01.1.06.08) 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.25.01.1.06.09)	115.190.744 647.085.000 42.489.700 88.720.000 30.100.000 11.840.202 440.488.585 164.198.221 18.960.000 76.023.100 999.679.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3.25.01.1.08.01)	18.000.000
						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.25.01.1.08.02)	140.936.712	
						3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.25.01.1.08.04)	1.212.524.463	
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (3.25.01.1.09.01)	96.080.000
						2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.25.01.1.09.02)	248.726.000	
						3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.25.01.1.09.09)	253.000.000	
3	Fahyuni Amaliah, S.Pi NIP. 198106282010012001		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (3.25.02.1.01.02)	788.931.878
4	Nana Indrayana Hidayat, S.Pi NIP. 197506102005021002		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				2	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3.25.02.1.01.04)	584.042.684
5	Muh. Husni, S.Pi NIP. 198209142011011001		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		2	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (3.25.02.1.03.01)	753.305.884
6	Fredrik Sibulo, S.Pi NIP. 197212062000121004		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (3.25.03.1.01.01)	58.180.500
7	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (3.25.03.1.02.03)	4.119.207.000
8	Azis, S.St.Pi NIP. 198508012010011008		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		3	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (3.25.03.1.06.02)	960.976.000
9	Sofian, S.Pi NIP. 198003032015031002		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		4	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (3.25.03.1.09.02)	254.180.716

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Muhammad Aradh, S.Pi NIP.197203052009011001	Kasi Perikanan Budidaya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (3.25.04.1.05.02) 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.1.05.05) 3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi (3.25.04.1.05.07) 4 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (3.25.04.1.05.08)	225.000.000 90.024.000 382.312.912 4.729.000.000	
11	Rukhi Syayahdin, S. ST. Pi NIP. 196807221991031020	Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (3.25.05.1.01.02) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya (3.25.05.1.02.01)	352.368.803 378.000.000	
12	Fatmawati, S.Pi., M.HP NIP. 198104272006042019	Kasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagiUsaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Blimbing, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (3.25.06.1.02.02)	1.227.640.433	

KEPALA DINAS,



Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P.
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196911031994031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : **005**/DKP-I
TANGGAL : 05 JANUARI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Siti Julfah, SH NIP. 197405072007012016	Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		-			
2	Nursidik, S.Pi NIP. 196507171989021004	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (3.25.01.1.02.02)	157.850.000	
3	Muhammad Ayit, SH NIP. 197510232010011010	Kepala Seksi Pengembangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.25.01.1.06.01)	51.512.172	
4	Nursidik, S.Pi NIP. 196507171989021004	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.25.01.1.06.02)	362.568.559	
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.25.01.1.06.05)	49.138.410	
						4 Fasilitas Kunjungan Tamu (3.25.01.1.06.08)	33.000.000	
						5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.25.01.1.06.09)	185.530.000	
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3.25.01.1.08.01)	11.750.000	
					3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.25.01.1.08.02)	156.294.000	
						3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.25.01.1.08.04)	1.241.515.453	

